

Dampak Pencemaran Limbah Dapur Program Makan Bergizi Gratis terhadap Masyarakat Sekitar di Kabupaten Banyuasin

Achmad Widiyanto, Komaruddin, Dumyati

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding email: achmadwidiyanto128@gmail.com, komaruddin_uin@radenfatah.ac.id, azza.dum@gmail.com

ARTICLE INFO

Article

History

Received : 10-06-2026

Revised : 21-06-2026

Accepted : 30-06-2026

Keywords

pencemaran lingkungan

limbah dapur

makan bergizi gratis

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals (MBG) program aims to improve the nutritional quality of the community, but it produces kitchen waste that has the potential to pollute the environment if not managed properly. This study aims to analyze the impact of MBG kitchen waste on the environment, health, and social life of the community in Monas Alley, Keramat Raya Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency, and to formulate a sustainable waste management strategy. The study used a qualitative approach through observation, in-depth interviews, and documentation. The results showed that kitchen waste causes water and soil pollution, unpleasant odors, clogged drainage, and has the potential to harm public health. Waste management efforts by the government and kitchen managers have been carried out, but still face limited resources and facilities. The study concluded that sustainable waste management requires strengthened supervision, improved waste treatment facilities, and active community participation so that the MBG program continues to provide benefits without causing negative impacts on the environment.

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, namun menghasilkan limbah dapur yang berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak limbah dapur MBG terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat di Lorong Monas, Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, serta merumuskan strategi pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah dapur menyebabkan pencemaran air dan tanah, bau tidak sedap, penyumbatan drainase, serta berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Upaya pengelolaan limbah oleh pemerintah dan pengelola dapur telah dilakukan, namun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan limbah yang berkelanjutan memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan fasilitas pengolahan limbah, serta partisipasi aktif masyarakat agar program MBG tetap memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan elemen fundamental yang menopang kehidupan manusia dan keberlangsungan pembangunan. Seluruh aktivitas manusia, baik di bidang

ekonomi, sosial, maupun politik, berlangsung dalam suatu sistem lingkungan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Lingkungan yang sehat tidak hanya mendukung keberlanjutan ekosistem, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat. Sebaliknya, penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran dapat menimbulkan berbagai permasalahan ekologis, sosial, dan ekonomi yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat (Soemarwoto, 2004).

Seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan pertumbuhan penduduk, masalah pencemaran lingkungan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia. Salah satu sumber pencemaran yang sering ditemukan di kawasan permukiman adalah limbah domestik dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan makanan. Aktivitas pengolahan makanan dalam skala rumah tangga maupun industri menghasilkan limbah padat berupa sisa bahan makanan, kemasan plastik, dan bahan organik lainnya, serta limbah cair yang mengandung minyak, lemak, deterjen, dan zat organik yang berpotensi mencemari lingkungan. Apabila tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara yang pada akhirnya menurunkan kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar (Effendi, 2003).

Pencemaran yang berasal dari limbah makanan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan jenis limbah lainnya karena sebagian besar mengandung bahan organik yang mudah mengalami pembusukan. Proses pembusukan tersebut menghasilkan bau tidak sedap, meningkatkan populasi serangga dan mikroorganisme, serta berpotensi menjadi media penyebaran penyakit. Selain itu, limbah cair yang mengandung lemak dan minyak dapat menyebabkan penyumbatan saluran drainase, menurunkan kualitas badan air, serta mengganggu sistem sanitasi lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah makanan bukan hanya berkaitan dengan aspek kebersihan, tetapi juga berhubungan erat dengan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan (Mukono, 2015).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pembangunan di bidang kesehatan dan gizi. Salah satu program strategis yang menjadi perhatian nasional adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya peserta didik, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya melalui penyediaan makanan bergizi secara berkelanjutan. Program MBG dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi berbagai permasalahan gizi yang masih ditemukan di berbagai daerah.

Pelaksanaan Program MBG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan kepada penerima manfaat. Keberadaan dapur MBG memberikan dampak positif yang cukup signifikan bagi masyarakat. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, program ini juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal, meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah operasional, serta memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Dengan berbagai manfaat tersebut, Program MBG menjadi salah satu kebijakan publik yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat maupun pemerintah.

Meskipun demikian, keberhasilan suatu program pembangunan tidak hanya diukur dari manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkannya, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Aktivitas pengolahan makanan dalam jumlah

besar yang dilakukan oleh dapur MBG menghasilkan limbah padat dan limbah cair dalam volume yang relatif tinggi. Limbah tersebut berasal dari proses pencucian bahan makanan, pencucian peralatan dapur, sisa makanan, minyak jelantah, serta berbagai jenis sampah organik dan anorganik lainnya. Apabila pengelolaan limbah tidak dilakukan secara optimal, maka aktivitas dapur MBG berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Fenomena tersebut mulai terlihat di Lorong Monas, Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan berbagai keluhan masyarakat, aktivitas dapur MBG di wilayah tersebut diduga menimbulkan sejumlah permasalahan lingkungan. Masyarakat mengeluhkan munculnya bau tidak sedap yang berasal dari limbah makanan, pencemaran saluran drainase akibat pembuangan limbah cair, meningkatnya populasi lalat di sekitar permukiman, serta menurunnya kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Keluhan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan program yang pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat menimbulkan konsekuensi lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik lingkungan, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial antara masyarakat, pengelola program, dan pemerintah daerah. Ketika masyarakat merasakan dampak negatif dari suatu kebijakan publik, maka muncul tuntutan terhadap pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan yang lebih efektif. Dengan demikian, persoalan limbah dapur MBG tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis pengelolaan sampah dan limbah, melainkan juga sebagai persoalan kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan.

Dalam perspektif politik lingkungan (*political ecology*), masalah lingkungan dipandang sebagai hasil interaksi antara faktor ekologis, ekonomi, sosial, dan politik. Bryant dan Bailey (1997) menjelaskan bahwa berbagai konflik lingkungan pada dasarnya berkaitan dengan distribusi manfaat dan distribusi risiko yang muncul dari suatu aktivitas pembangunan. Kelompok tertentu memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari suatu kebijakan, sementara kelompok lainnya harus menanggung beban lingkungan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Oleh karena itu, analisis politik lingkungan menjadi penting untuk memahami bagaimana relasi antara pemerintah, pengelola program, dan masyarakat terbentuk dalam konteks pengelolaan limbah dapur MBG.

Penelitian mengenai dampak lingkungan dari kegiatan pengolahan makanan sebenarnya telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa limbah rumah makan dan industri catering dapat menyebabkan pencemaran air, pencemaran tanah, gangguan kesehatan, dan konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji dampak limbah dapur Program Makan Bergizi Gratis dari perspektif politik lingkungan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek teknis pengelolaan limbah atau aspek kesehatan lingkungan, sehingga belum banyak membahas hubungan antara kebijakan publik, distribusi manfaat program, dan dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian mengenai dampak limbah dapur Program Makan Bergizi Gratis terhadap masyarakat sekitar dalam perspektif politik lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian politik lingkungan

sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dan pengelola program dalam merumuskan strategi pengelolaan limbah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dampak limbah dapur Program Makan Bergizi Gratis terhadap masyarakat sekitar di Lorong Monas Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin; dan (2) merumuskan strategi pengelolaan limbah yang mendukung keberlanjutan program serta menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena pencemaran limbah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi dalam konteks sosial dan lingkungan tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan berbagai pihak yang terlibat maupun terdampak oleh keberadaan dapur MBG, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak lingkungan yang muncul serta respons yang diberikan oleh pemerintah dan pengelola program. Menurut Moleong (2018), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah.

Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu dampak pencemaran limbah dapur MBG yang beroperasi di Lorong Monas, Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Studi kasus memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam lingkungan nyata sehingga hubungan antara faktor sosial, lingkungan, dan kebijakan dapat dipahami secara lebih utuh (Yin, 2018).

Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan adanya aktivitas dapur MBG yang berada di tengah kawasan permukiman penduduk serta munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait dampak limbah yang dihasilkan. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada relevansi kasus dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas dapur MBG dan menelaah upaya pengelolaan limbah yang telah dilakukan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, pengelola dapur MBG, dan masyarakat sekitar. Informan dari unsur pemerintah berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Informan dari unsur pengelola merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional dapur MBG dan pengelolaan limbah yang dihasilkan. Sementara itu, informan dari unsur masyarakat merupakan warga yang tinggal di sekitar lokasi dapur dan secara langsung merasakan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (in-depth interview). Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi lingkungan, sistem pengelolaan limbah, pola pembuangan limbah cair dan limbah

padat, serta berbagai dampak yang muncul di sekitar area dapur MBG. Melalui observasi, peneliti dapat mengidentifikasi kondisi fisik lingkungan dan membandingkannya dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Teknik ini dipilih agar peneliti memperoleh data yang lebih luas dan mendalam tanpa membatasi jawaban informan pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kaku. Wawancara dilakukan kepada pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, pengelola dapur MBG, ketua RT setempat, dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penelitian. Melalui wawancara tersebut diperoleh informasi mengenai bentuk pencemaran yang terjadi, dampak yang dirasakan masyarakat, mekanisme pengelolaan limbah yang diterapkan, serta respons pemerintah terhadap berbagai keluhan yang muncul.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data sekunder berasal dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen pemerintah, laporan kegiatan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian sekaligus memberikan konteks yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga lebih mudah dianalisis. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga hubungan antar-temuan dapat dipahami secara jelas. Selanjutnya, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung guna memperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, baik dari pihak pemerintah, pengelola dapur, maupun masyarakat. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data serta meminimalkan kemungkinan terjadinya bias dalam proses penelitian (Sugiyono, 2019).

Melalui pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai dampak pencemaran limbah dapur Program Makan Bergizi Gratis terhadap masyarakat sekitar serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Hasil dan Diskusi

Government Responses to Kitchen Waste Pollution

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin telah melakukan berbagai upaya dalam merespons keluhan masyarakat terkait dampak limbah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Respons tersebut meliputi kegiatan pengawasan lapangan, inspeksi lingkungan, mediasi antara

masyarakat dan pengelola dapur, serta pemberian edukasi mengenai pentingnya pengelolaan limbah yang sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari unsur pemerintah dan masyarakat, diketahui bahwa keluhan masyarakat mulai muncul setelah aktivitas dapur MBG beroperasi secara rutin dalam skala besar. Keluhan yang paling sering disampaikan berkaitan dengan bau tidak sedap, perubahan kualitas air pada saluran drainase, serta meningkatnya jumlah lalat di sekitar permukiman. Menanggapi laporan tersebut, pemerintah daerah melakukan peninjauan lapangan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dan memberikan rekomendasi kepada pengelola dapur agar meningkatkan sistem pengelolaan limbah yang digunakan.

Ketua RT setempat menjelaskan bahwa pemerintah pernah melakukan inspeksi setelah menerima pengaduan warga mengenai kondisi lingkungan yang dianggap semakin tidak nyaman. Kehadiran pemerintah dalam menangani keluhan tersebut menunjukkan fungsi pemerintah sebagai regulator dan pengawas lingkungan yang bertanggung jawab memastikan setiap aktivitas pembangunan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam perspektif politik lingkungan, peran pemerintah sangat penting sebagai aktor yang menjembatani kepentingan pembangunan dengan perlindungan lingkungan (Salim, 1986).

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum berlangsung secara optimal. Keterbatasan jumlah petugas, luasnya wilayah pengawasan, dan keterbatasan sarana pendukung menyebabkan pengawasan lingkungan lebih banyak bersifat responsif setelah adanya keluhan masyarakat dibandingkan bersifat preventif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi lingkungan yang telah tersedia dengan implementasinya di lapangan. Padahal, pengawasan yang bersifat preventif diperlukan untuk mencegah munculnya dampak lingkungan yang lebih besar di masa mendatang.

Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas pengelolaan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan aturan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah agar pengelolaan dampak lingkungan dari program-program sosial dapat berjalan lebih efektif.

Water Pollution Impact

Salah satu dampak yang paling banyak dirasakan masyarakat adalah pencemaran air. Aktivitas dapur MBG menghasilkan limbah cair yang berasal dari proses pencucian bahan makanan, pencucian peralatan dapur, sisa makanan, minyak goreng, dan berbagai bahan organik lainnya. Limbah tersebut sebagian besar dialirkan ke sistem drainase yang berada di sekitar kawasan permukiman.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, saluran drainase di sekitar lokasi penelitian menunjukkan perubahan kondisi fisik berupa warna air yang lebih keruh, adanya lapisan minyak pada permukaan air, serta munculnya aroma tidak sedap. Selain itu, masyarakat mengeluhkan terjadinya penyumbatan saluran drainase yang menyebabkan aliran air menjadi tidak lancar, terutama pada saat curah hujan tinggi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat mengaitkan kondisi tersebut dengan meningkatnya volume limbah yang dihasilkan oleh aktivitas dapur MBG. Menurut warga, sebelum dapur beroperasi secara intensif, saluran drainase relatif bersih dan jarang

mengalami penyumbatan. Namun setelah aktivitas produksi makanan meningkat, kondisi drainase menjadi lebih sering dipenuhi endapan lemak dan sisa bahan organik.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Effendi (2003) yang menyatakan bahwa limbah organik dapat meningkatkan kandungan bahan pencemar dalam air sehingga menurunkan kualitas badan air. Kandungan minyak dan lemak yang masuk ke saluran drainase dapat menghambat proses penguraian alami serta mengurangi kapasitas aliran air. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kesehatan lingkungan dan kualitas sanitasi masyarakat.

Selain dampak fisik terhadap lingkungan, pencemaran air juga menimbulkan dampak sosial berupa meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas lingkungan tempat tinggal mereka. Kekhawatiran tersebut muncul karena masyarakat menilai bahwa pencemaran yang terjadi dapat berkembang menjadi masalah kesehatan apabila tidak segera ditangani secara serius.

Soil Pollution Impact

Selain pencemaran air, penelitian ini juga menemukan adanya indikasi pencemaran tanah yang disebabkan oleh penumpukan limbah organik di sekitar area dapur MBG. Limbah organik berupa sisa sayuran, potongan bahan makanan, dan sisa makanan yang tidak segera diangkut menyebabkan terjadinya proses pembusukan di area penampungan sementara.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pada beberapa titik terdapat akumulasi limbah organik yang menghasilkan cairan berwarna gelap serta aroma yang menyengat. Cairan tersebut merupakan lindi yang terbentuk dari proses dekomposisi bahan organik. Apabila terus meresap ke dalam tanah, lindi berpotensi menurunkan kualitas tanah dan mempengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar.

Menurut Mukono (2015), limbah organik yang mengalami pembusukan dapat menghasilkan berbagai senyawa yang berpotensi mencemari tanah dan menjadi media pertumbuhan mikroorganisme patogen. Kondisi ini tidak hanya berdampak terhadap kualitas lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko munculnya vektor penyakit seperti lalat dan tikus.

Masyarakat sekitar mengaku sering melihat peningkatan jumlah lalat terutama pada saat cuaca panas dan ketika volume sampah meningkat. Keberadaan lalat dalam jumlah besar menimbulkan ketidaknyamanan sekaligus meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyebaran penyakit. Oleh karena itu, pengelolaan limbah organik menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam operasional dapur MBG.

Air Pollution and Community Comfort

Dampak lain yang paling sering dikeluhkan masyarakat adalah menurunnya kualitas udara akibat bau tidak sedap yang berasal dari limbah dapur. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar warga merasakan aroma menyengat terutama pada waktu tertentu ketika volume limbah sedang tinggi atau ketika proses pengangkutan sampah mengalami keterlambatan.

Bau tersebut berasal dari proses pembusukan bahan organik yang menghasilkan gas seperti amonia, metana, dan hidrogen sulfida. Meskipun tidak selalu berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan, keberadaan bau secara terus-menerus dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan menurunkan kualitas hidup warga yang tinggal di sekitar lokasi.

Dalam perspektif kesehatan lingkungan, kualitas udara yang buruk dapat mempengaruhi kenyamanan psikologis masyarakat. Beberapa informan menyatakan bahwa

mereka merasa terganggu ketika beraktivitas di luar rumah atau menerima tamu karena adanya aroma yang tidak sedap dari area dapur MBG.

Temuan ini menunjukkan bahwa dampak limbah tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial. Ketika kualitas lingkungan menurun, hubungan antara masyarakat dan pengelola kegiatan dapat mengalami ketegangan. Beberapa warga bahkan mulai mempertanyakan keberlanjutan operasional dapur apabila permasalahan lingkungan tidak segera diselesaikan. Dengan demikian, pengelolaan limbah yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga harmonisasi hubungan antara masyarakat dan pengelola program.

Waste Management Practices

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola dapur MBG telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional dapur. Beberapa langkah yang telah diterapkan meliputi pemisahan limbah organik dan anorganik, pengangkutan sampah secara berkala, penggunaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sederhana, serta kegiatan pembersihan area dapur setiap hari.

Pemisahan limbah dilakukan untuk memudahkan proses pengelolaan dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Limbah organik dipisahkan dari limbah anorganik sehingga memungkinkan dilakukannya pengolahan lebih lanjut. Selain itu, pengangkutan sampah secara rutin juga dilakukan untuk mencegah penumpukan limbah yang dapat menimbulkan bau dan menjadi sarang vektor penyakit.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan limbah yang ada masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu kendala utama adalah kapasitas IPAL yang belum mampu menampung seluruh limbah cair yang dihasilkan, terutama ketika jumlah produksi makanan meningkat secara signifikan. Akibatnya, sebagian limbah cair masih berpotensi masuk ke saluran drainase di sekitar permukiman.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas pengelolaan limbah belum sepenuhnya sebanding dengan volume limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah menjadi kebutuhan yang mendesak guna meminimalkan dampak lingkungan yang muncul.

Political Ecology Analysis

Dalam perspektif politik lingkungan (political ecology), kasus pencemaran limbah dapur MBG di Lorong Monas menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara kebijakan publik, manfaat sosial, dan risiko lingkungan. Program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan sosial yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat melalui peningkatan gizi, penguatan ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja lokal. Namun di sisi lain, aktivitas operasional program menghasilkan dampak lingkungan yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dapur.

Bryant dan Bailey (1997) menjelaskan bahwa konflik lingkungan sering muncul ketika distribusi manfaat dan distribusi risiko pembangunan tidak berlangsung secara adil. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat memperoleh manfaat tidak langsung dari keberadaan program MBG, tetapi pada saat yang sama harus menghadapi risiko berupa pencemaran air, pencemaran tanah, gangguan kualitas udara, dan menurunnya kenyamanan lingkungan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan tidak dapat diukur semata-mata dari pencapaian tujuan sosialnya. Aspek keberlanjutan lingkungan juga harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan publik. Pemerintah sebagai pemegang otoritas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa manfaat

pembangunan dapat dinikmati masyarakat tanpa menimbulkan beban lingkungan yang berlebihan.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pengelola dapur MBG, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Penguatan pengawasan lingkungan, peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan limbah, penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi konflik lingkungan dan mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lorong Monas, Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin menimbulkan berbagai dampak lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Dampak tersebut meliputi pencemaran air akibat pembuangan limbah cair yang mengandung minyak, lemak, dan bahan organik, pencemaran tanah akibat penumpukan limbah organik yang menghasilkan lindi, serta penurunan kualitas udara yang ditandai dengan munculnya bau tidak sedap dari proses pembusukan sisa makanan. Selain berdampak pada kualitas lingkungan, kondisi tersebut juga mempengaruhi kenyamanan masyarakat dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya merespons keluhan masyarakat melalui kegiatan pengawasan, inspeksi lapangan, mediasi, dan edukasi lingkungan. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait sumber daya manusia dan sarana pendukung. Di sisi lain, pengelola dapur MBG telah menerapkan beberapa langkah pengelolaan limbah seperti pemisahan sampah, pengangkutan rutin, penggunaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan pembersihan area dapur secara berkala. Meskipun demikian, kapasitas pengelolaan limbah yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengimbangi volume limbah yang dihasilkan sehingga masih ditemukan potensi pencemaran lingkungan.

Dalam perspektif politik lingkungan, penelitian ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara manfaat sosial yang dihasilkan Program MBG dengan beban lingkungan yang harus ditanggung oleh masyarakat sekitar. Program MBG memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan gizi masyarakat dan penciptaan peluang ekonomi lokal, namun pada saat yang sama menimbulkan risiko lingkungan yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan sosial, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Untuk mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, diperlukan peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan limbah, optimalisasi fungsi IPAL, penguatan pengawasan pemerintah daerah, serta penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R) dalam pengelolaan limbah. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, pengelola program, dan warga sekitar menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan limbah yang efektif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Declarations

Author contribution. Author 1 conducted field research, data collection, and manuscript preparation. Author 2 contributed to conceptual development, theoretical analysis, and manuscript review.

Funding statement. This research received no specific grant from any funding agency..

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Additional information. No additional information is available for this paper.

Referensi

- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology*. Routledge.
- Chandra, B. (2016). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. EGC.
- Effendi, H. (2003). *Telaah Kualitas Air*. Kanisius.
- Hardjasoemantri, K. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Hadi, S. P. (2018). *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gadjah Mada University Press.
- Herdiansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika.
- Kodoatie, R. J. (2012). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Andi.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mukono. (2015). *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Airlangga University Press.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Kesehatan Masyarakat*. Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Publik di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Puspitasari, R. (2021). *Strategi Pengelolaan Limbah pada Program Sosial Berbasis Masyarakat*.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Salim, E. (2016). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Mutiara.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*.
- Sugiharto. (2007). *Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Utami, D. (2017). *Analisis Dampak Limbah Rumah Makan terhadap Kualitas Air*.
- Yuliani, S. (2020). *Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat*.